

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Finlandia adalah sebuah negara yang terletak di Eropa bagian utara, dengan ibukotanya Helsinki. Status dari negara ini adalah netral sejak tahun 1948 saat Finlandisasi diberlakukan dalam upaya tak berpihak terhadap negara-negara dengan kekuatan besar (Botticelli, 1986). Selain itu, Finlandia menjadi negara yang aktif dalam berbagai kegiatan perdamaian, yaitu dalam bidang *peacekeeping* (penjaga perdamaian), *peacemaking* (pembuat perdamaian) dan pemberian bantuan luar negeri.

Dalam bidang *peacekeeping*, Finlandia membuat Pusat Manajemen Krisis atau *Central Crisis Management* yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam manajemen krisis yang diadakan bila ada suatu negara yang sedang mengalami konflik. Manajemen tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Manajemen Krisis Militer dan Manajemen Krisis Sipil. Manajemen Krisis Militer adalah proses *peacekeeping* berupa pengiriman personil militer dan tentara penjaga untuk mengawasi krisis dan konflik bersenjata di negara berkonflik dan merumuskan solusi untuk menyelesaikannya. Sementara Manajemen Krisis Sipil adalah proses *peacekeeping* berupa pengiriman perwakilan staff militer untuk mengembangkan sarana masyarakat yang dibutuhkan selama konflik seperti polisi, penjaga perbatasan, peradilan, perlindungan adat istiadat, sistem penjara dan administrasi lain-lain. (Ministry for Foreign Affairs of Finland, n.d)

Selama menjalankan Pusat Manajemen Krisis, Finlandia telah mengirimkan 28 personil dan 224 perwakilan di wilayah Eropa, 33 personil dan 3 perwakilan di wilayah Afrika, 310 personil dan 2 perwakilan di Timur Tengah, dan 85 personil serta 28 perwakilan di wilayah Asia (**untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran**) (Ministry for Foreign Affairs of Finland, n.d).

Selain mendirikan Badan Manajemen Krisis Pusat, Finlandia berperan sebagai anggota aktif dari 13 organisasi yaitu Dewan Eropa, *Organisation for Security and Co-operation in Europe* (OSCE), *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *World Trade Organization* (WTO), *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization* (CTBTO), *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *United Nations Human Settlements Programme* (UN-HABITAT), Perwakilan dari *African Union* (AU), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *NATO Partnership for Peace*, namun tidak termasuk sebagai anggota penuh NATO. (Ministry for Foreign Affairs of Finland, n.d)

Dalam bidang *peacemaking*, Finlandia berperan sebagai mediator di antara negara yang sedang berkonflik, baik konflik antar negara atau konflik internal. Salah satu contohnya adalah ketika Finlandia menjadi mediator antara Indonesia dengan GAM yang menghasilkan kesepakatan otonomi khusus kepada provinsi NAD (Accord, 2008). Selain itu sejak tahun 1990 hingga 2014, Finlandia telah mengeluarkan anggaran sebesar € 8.725.000 untuk mendirikan enam program

peacemaking yang tersebar di wilayah-wilayah konflik (**untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran**) (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2010).

Finlandia juga membuat *Action Plan* berupa *Group of Friends of Mediations 2010*, yaitu kerjasama antara negara-negara mediator baik yang sudah lama berkecimpung dalam mediasi seperti Norwegia, Swiss dan Finlandia maupun negara yang masih baru seperti Indonesia, Brazil dan Turki. Kerjasama tersebut berupa saling berbagi informasi dan strategi mediasi konflik. Dalam *Action Plan* tersebut pula, Finlandia membagi dua lingkup kerjasama yaitu untuk lingkup anggota Uni Eropa dan lingkup anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena aksi Finlandia yang berinisiatif untuk mengumpulkan negara-negara mediator untuk saling bekerjasama, negara ini diberi status sebagai *peacemaker* (Ministry for Foreign Affairs of Finland, n.d).

Dalam pemberian bantuan luar negeri, Finlandia lebih banyak memberikan bantuan kepada negara-negara di Afrika seperti Liberia, Angola, Sierra Leone, Guinea, Sahel (wilayah perbatasan antara Afrika Utara dengan Afrika Tengah), Mali, Afrika Tengah, Chad, Kongo, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan dan Sudan. Bantuan telah diprioritaskan di Afrika sejak tahun 2013 (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2013), dan seiring waktu Finlandia memperluas jumlah negara di Afrika yang membutuhkan bantuan luar negeri hingga awal 2015 (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2015). Finlandia juga memberikan bantuan luar negeri di wilayah konflik seperti Afghanistan, Irak, Palestina dan Yaman. Sementara negara yang pernah sekali mendapat bantuan pada tahun 2014 di benua Asia lainnya adalah Myanmar, Nepal dan Filipina, dan di

benua Eropa seperti Serbia, Bosnia-Herzegovina dan Ukraina (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2014).

Sementara itu pada November 2013, dua negara tetangga dari Finlandia yakni Rusia dan Ukraina sedang mengalami konflik yang dikarenakan rencana Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa, yang kemudian berlanjut pada aneksasi Crimea pada 1 Maret, dimana kemudian pada 21 Maret 2014 Crimea menjadi bagian dari wilayah Rusia. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Rusia sepanjang 1300 meter, Finlandia yang merasa terancam oleh sikap agresif Rusia melakukan patroli udara lebih ketat selama aneksasi Crimea berlangsung (Strange & Ensor, 2014).

Dalam menghadapi Krisis Ukraina pada tahun 2014, Presiden Finlandia Sauli Niinistö menyatakan bahwa Finlandia hanya akan memberikan bantuan kemanusiaan dan tidak mengirimkan tentara penjaga ke Ukraina (Boiko, 2015). Bantuan kemanusiaan yang dikirim untuk Ukraina berjumlah € 6.415.000, memfokuskan kepada *monitoring* keadaan lingkungan dan hak-hak asasi pengungsi warga sipil (**untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran**) (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2014).

Sementara itu Uni Eropa telah meminta Finlandia untuk segera membuat program mediasi antara Rusia dan Ukraina, mengingat reputasi dia sebagai *peacemaker*, ditambah sebagai negara tetangga dari Rusia, serta sebagai anggota yang paling aktif dalam berbagai organisasi termasuk Uni Eropa (Pawlak & Baker, 2014). Namun hingga akhir 2014, tidak ada tanda-tanda Finlandia hendak

mempertemukan Rusia dan Ukraina untuk bernegosiasi dan mediasi. Sampai pergantian posisi Perdana Menteri Jyrki Katainen ke Alexander Stubb pada Juni 2014 sampai akhir 2014, belum ada pengumuman resmi baik dari Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri bahkan Presiden.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Finlandia tidak memainkan peran tradisionalnya sebagai *peacemaker* dalam mengatasi krisis antara Ukraina dan Rusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk tujuan-tujuan yang futuristik dan menambah wawasan pembaca terkait topik yang dibahas, yaitu :

1. Mengetahui alasan Finlandia tidak langsung berinisiatif sebagai *peacemaker* dalam menangani kasus Krisis Ukraina antara Ukraina dan Rusia.
2. Menguji teori kebijakan luar negeri mengenai peran identitas dalam hubungan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai pembelajaran negara-negara mediator khususnya Indonesia dalam menggunakan identitasnya untuk kegiatan hubungan internasional di bidang *peacemaking*.
2. Sebagai pembelajaran mengenai perumusan dan penentuan kebijakan luar negeri yang hendaknya juga mempertimbangkan faktor non-strategis yaitu identitas.

1.5 Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan perspektif Konstruktivis sebagai landasan teori untuk menganalisa rumusan masalah ini. Alasan penulis menggunakan teori Konstruktivis karena dianggap lebih relevan untuk menjelaskan perubahan tindakan suatu negara dalam menentukan kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan identitasnya yang telah digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Asal mula dari Konstruktivis adalah sebuah teori sosiologi intepretatif bernama Interaksionisme Simbolik. Pertama kali dikemukakan oleh Herbert Blumer pada tahun 1969 dalam bukunya yang berjudul *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Blumer menyatakan terdapat tiga dasar dari teori tersebut. Pertama, tindakan seseorang terhadap objek karena makna objek tersebut. Kedua,

makna tadi tercipta dari interaksi sosial. Ketiga, proses penafsiran mampu mengubah makna tadi (Blumer, 1969).

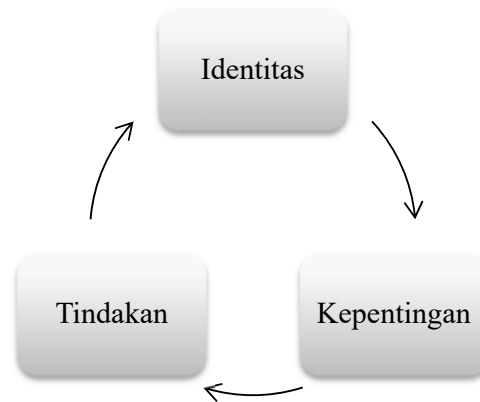
Tidak seperti teori-teori tradisional seperti Realisme dan Liberalisme yang melihat kondisi hubungan internasional sebagai sesuatu yang sudah ada dengan mutlak, Konstruktivis melihat setiap kondisi hubungan internasional memiliki sebab tertentu. Oleh sebab itu gagasan ataupun karakteristik seseorang menentukan peran dan tindakannya dalam kegiatan hubungan internasional (Wendt, 1999).

Konstruktivis juga berbeda dalam menafsirkan kata anarki. Realisme dan Liberalisme mendefinisikan anarki sebagai suatu keadaan alami yang harus dialami para aktor, dimana masing-masing dari aktor tersebut dipaksa untuk membuat sebuah tindakan. Sementara Konstruktivis menafsirkan kata anarki adalah suatu hal yang saling berhubungan erat di antara aktor-aktor yang terlibat, dimana itu dihasilkan oleh interaksi sosial. Aktor dapat melihat anarki tergantung bagaimana aktor tersebut melakukan subjektivitas terhadap aktor lain, dan sebaliknya. Sehingga anarki bisa mengalami banyak makna, entah dalam hal baik ataupun buruk. Dengan kata lain, anarki bukanlah hal alami melainkan proses subjektivitas dan sosial (Wendt, 1992, p. 414). Selain itu Wendt juga membagi tiga jenis anarki, yaitu Hobbesian dimana negara melihat negara lain sebagai lawan, Lockean dimana negara melihat negara lain sebagai rival, dan Kantian dimana negara melihat negara lain sebagai kawan (Wendt, 1999).

Dalam Konstruktivis, mereka mengutamakan tiga konsep yang mempengaruhi sebuah tindakan manusia dalam hubungan internasional, yaitu

identitas, norma dan bahasa (Wendt, 1999). Konsep yang hendak ditekankan untuk penelitian ini adalah Konsep Identitas. Dalam konsep tersebut, identitas dapat dimaknai dengan dua cara. Pertama, identitas dimaknai sebagai atribut yang terbentuk karena terjadinya proses interaksi dengan pihak lain. Proses interaksi yang terus menerus terjadi membuat atribut dengan makna tertentu terbentuk. Namun atribut ini mudah berubah tergantung dari proses interaksi dan pemaknaan atribut tersebut. Kemudian yang kedua, identitas dimaknai sebagai suatu atribut yang tidak memerlukan proses sosial dengan atribut aktor lain. Untuk atribut ini, aktor yang bersangkutan sadar sepenuhnya akan keunikannya yang dimilikinya (*self-awareness*) dan membedakannya dengan keunikannya aktor lainnya. Atribut ini tergolong stabil karena sudah melekat sejak awal (Rosyidin, 2015, pp. 46-47).

Alexander Wendt menggabungkan kedua pemaknaan akan identitas, yang kemudian muncul definisi baru identitas sebagai “atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan” (Wendt, 1999, p. 224). Artinya, identitas dapat membentuk kepentingan aktor baik seseorang maupun negara, yang kemudian kepentingan itu membentuk tindakan yang nantinya secara tidak langsung juga akan membentuk identitas. Baik identitas yang sama atau berubah menjadi identitas baru. Sehingga apabila dibuat bagan dengan dasar makna yang disebutkan Alexander Wendt, maka akan menjadi bagan ini:



Bagan I.1. Identitas, Kepentingan, dan Tindakan

Sumber: Rosyidin, 2015, p. 49

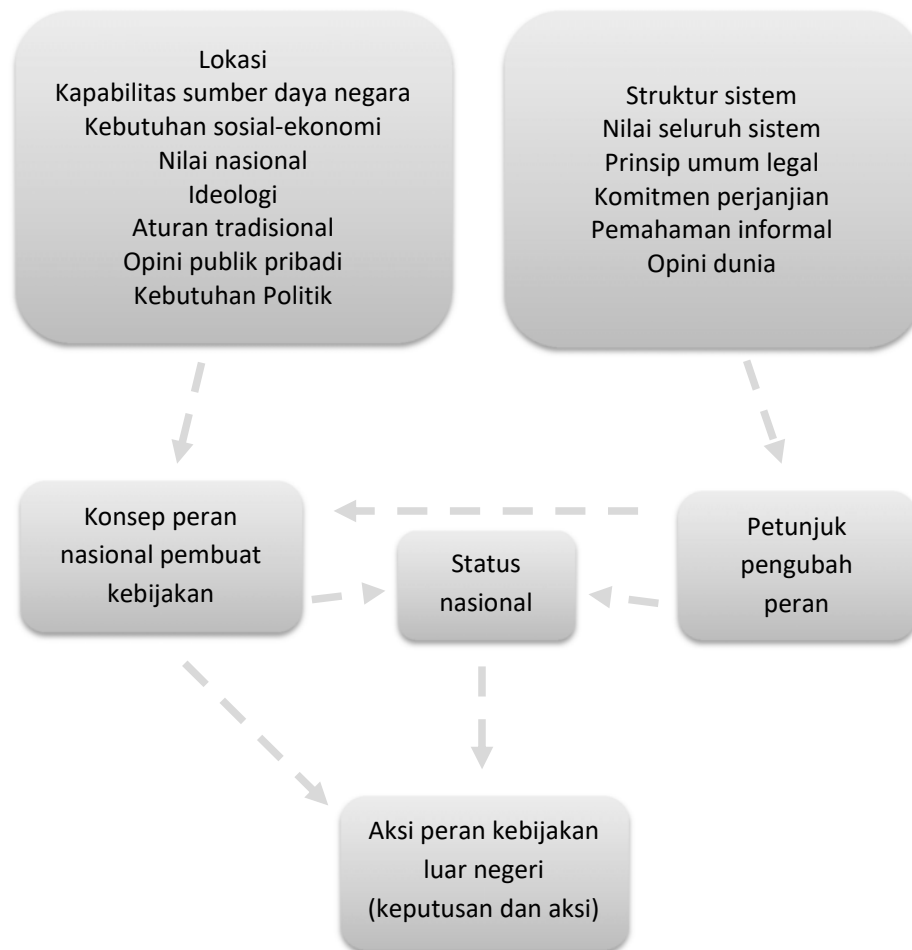
Kemudian Alexander Wendt juga membagi empat jenis identitas dalam hubungan internasional (Wendt, 1992, pp. 224-229). Pertama adalah identitas personal atau *corporate identity* dimana identitas suatu aktor terbentuk secara alamiah dan tidak ada unsur paksaan. Selain itu identitas personal berfokus untuk menunjukkan perbedaan satu aktor dengan aktor lainnya. Seperti contohnya yakni bentuk fisik, lambang negara, nasionalisme dan lain-lain.

Karena identitas ini disadari oleh negara bersangkutan sejak awal, maka identitas ini cenderung stabil tergantung bagaimana negara tersebut melihat dirinya sendiri. Dengan adanya identitas personal, terbentuklah empat dasar kepentingan negara yaitu keamanan fisik suatu aktor, sikap dan keinginan aktor dalam mempertahankan identitas, pengembangan aspirasi hidup masing-masing dan keinginan aktor agar identitasnya diakui oleh lainnya (Wendt, 1994, p. 385).

Identitas kedua adalah identitas tipe atau *type identity*. Identitas ini dipengaruhi oleh kategori tertentu seperti ideologi politik atau agama, dan terbentuknya identitas ini bisa secara alamiah seperti identitas personal atau berubah bentuk karena suatu peristiwa. Sama seperti identitas personal, identitas tipe relatif stabil.

Identitas ketiga adalah identitas peran (*role identity*) yang memfokuskan kedudukan atau posisi aktor dalam hubungan internasional. Identitas ini baru bisa terbentuk apabila aktor yang bersangkutan melakukan suatu aktivitas hubungan internasional dengan aktor lain dan mendapat tanggapan. Ketika aktivitas tersebut dilakukan secara terus menerus, maka akan terjadi interaksi timbal balik dan masing-masing dari aktor secara tidak langsung mendapatkan identitas mereka sendiri yang memiliki peran tertentu. Identitas ini bisa berubah seiring perkembangan akan pemakaian suatu identitas oleh aktor lain, atau aktor yang bersangkutan berhenti melakukan aktivitas yang berhubungan dengan identitas tersebut.

Jenis identitas ini memiliki hubungan dengan pembentukan identitas menjadi kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh Holsti dalam jurnalnya *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. Terbentuknya kebijakan luar negeri suatu aktor dipengaruhi oleh faktor internal (unsur negara, opini publik, dan lainnya) dan faktor eksternal (nilai dan norma internasional, opini dari aktor lainnya, dan lain-lain). Apabila digabungkan, selanjutnya akan terlihat apa posisi suatu aktor dan bagaimana aktor tadi seterusnya bertindak dalam hubungan internasional (Holsti, 1970, p. 245).

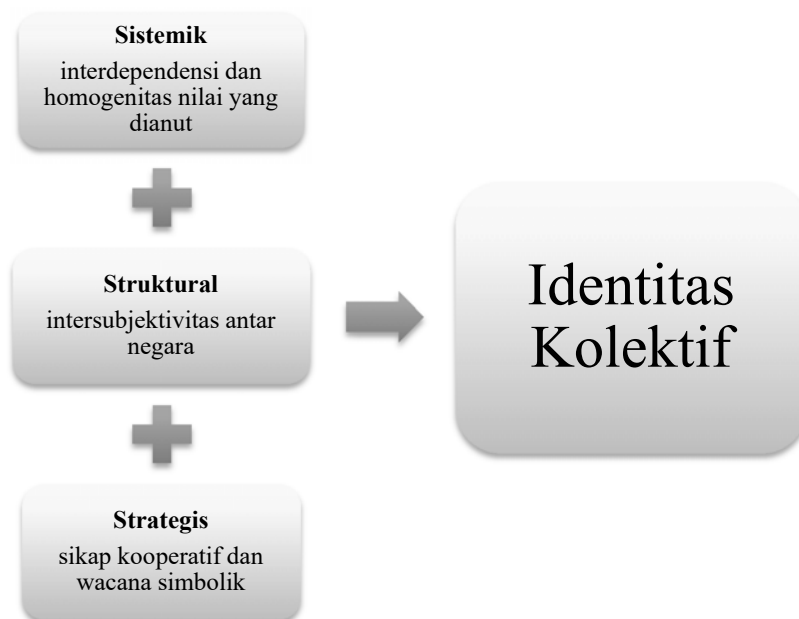


Bagan I.2. Konsep Peran Nasional dalam Politik Luar Negeri

Sumber: Holsti, 1970, p. 245

Identitas terakhir adalah identitas kelompok atau *collective identity*. Jenis identitas ini terbentuk ketika terdapat suatu kelompok yang berisikan kumpulan aktor negara saling berhubungan, dan pada akhirnya membentuk suatu identitas yang dimiliki secara bersamaan karena bergabung dengan kelompok tersebut. Hubungan antar aktor negara bisa terjadi karena saling ketergantungan atau karena rasa solidaritas yang tinggi.

Wendt memaparkan tiga faktor yang membentuk identitas kolektif suatu aktor (Wendt, 1994). Pertama adalah faktor sistemik atau faktor interaksi antar negara. Interaksi tersebut bisa pula berbentuk saling bergantung satu sama lain atau memiliki persamaan nilai seperti ideologi, agama, budaya dan sebagainya. Faktor kedua adalah faktor struktural atau faktor intersubjektivitas antarnegara. Dalam kata lain, faktor ini mengacu akan bagaimana negara mengidentifikasi negara lainnya dan sebaliknya. Identitas kolektif kemudian baru terbentuk bila dua atau lebih negara sama-sama mengidentifikasikan satu sama lain sebagai kawan. Faktor terakhir adalah faktor strategis atau faktor komunikasi antarnegara. Negara yang bersikap ramah pada negara lainnya tentu akan mendapat tanggapan positif dan timbulnya rasa solidaritas satu sama lain.



Bagan I.3. Faktor Pembentuk Identitas Kolektif

Sumber: Rosyidin, 2015, p. 59

Identitas suatu aktor bisa pula berubah meskipun telah memegang suatu identitas dalam jangka waktu yang lama. Perubahan dari identitas bisa terjadi karena pemaknaan yang berbeda dari aktor lain, atau karena ada dua faktor yang membuatnya berubah. Faktor perubahannya bisa secara internal (domestik) maupun eksternal (internasional). Contoh faktor secara domestik adalah karakter dan gaya kepemimpinan elite pemerintah, yang ditentukan oleh kepribadian dari pemimpin suatu negara. Sementara faktor secara internasional adalah terjadinya perubahan peristiwa atau lingkungan internasional yang baru sementara identitas yang dikenakan oleh aktor tidak cocok digunakan. Pada akhirnya, negara pun harus beradaptasi dengan bertransformasi identitas yang baru agar dapat diterima di kalangan internasional, dimana hal ini disebut sebagai krisis identitas (Rosyidin, 2015, pp. 61-65).

Selain itu suatu aktor bisa memiliki beberapa identitas secara sekaligus, tergantung dari situasi apa yang sedang dihadapi negara tersebut (Rosyidin, 2015, p. 60). Tetapi ketika aktor tersebut memiliki dua identitas atau lebih yang saling bertolak belakang ketika menghadapi situasi yang sama, hal ini kemudian disebut sebagai konflik identitas (*identity/role conflict*) (Hendropuspito, 1989, pp. 105-107). Pada umumnya, aktor tersebut dapat bernegosiasi dan memilih salah satu identitas yang lebih relevan dan penting dalam menghadapi situasi tersebut tanpa mengorbankan identitas yang lain. Namun apabila identitas yang saling bertolak belakang sama-sama memiliki cara atau solusi yang relevan dan penting dalam mengatasi situasi yang dihadapi sebelumnya, konflik identitas semakin sulit untuk dipecahkan kecuali aktor tersebut harus berkorban dengan menghilangkan salah

satu identitas yang bertolak belakang dalam rangka menyelesaikan situasi yang dihadapi (Settles, et al., 2002, pp. 575-576).

1.6 Hipotesis

Berdasarkan dari pemahaman terhadap latar belakang masalah, kerangka pemikiran serta landasan teori diatas, maka hipotesis yang dapat ditarik mengenai alasan Finlandia tidak memainkan peran langsung sebagai *peacemaker* dalam menghadapi Krisis Ukraina antara Rusia dan Ukraina adalah karena Finlandia mengalami *identity/role conflict* antara identitas peran sebagai *peacemaker* dengan identitas kolektif sebagai anggota Uni Eropa yang kontra terhadap sikap Rusia dalam berkonflik dengan Ukraina. Sehingga Finlandia masih ragu untuk terlibat dalam penyelesaian konflik antara Rusia dengan Ukraina.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., baik secara holistik maupun dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007). Penelitian kualitatif relevan dengan topik permasalahan yang akan menjelaskan dan

memahami mengenai peran dan makna individu atau kelompok yang menyebabkan timbulnya masalah sosial (Windiani & Wahyudi, 2015).

1.7.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah generalisasi dari konsep atau istilah yang bersifat konstitutif berdasarkan pendapat para ahli sekaligus sebagai batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga memudahkan untuk mengoperasionalkannya dalam penelitian.

1.7.1.1 Hubungan Internasional

Sebelum mendefinisikan 'Hubungan Internasional' lebih detail, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu kata 'hubungan'. Definisi hubungan menurut Merriam-Webster (2016) adalah cara dua atau lebih individu, kelompok, negara dsb dalam berbicara, bersikap dan menghadapi satu sama lain. Kemudian definisi internasional menurut Dictionary.com (2016) adalah hal yang melibatkan dua atau lebih negara dan bersifat di luar batas negara.

Selain itu terdapat definisi tersendiri dari hubungan internasional. Pertama, hubungan internasional diartikan oleh Soeprapto (1997, p. 1) sebagai:

Studi mengenai interaksi antar aktor-aktor atau kesatuan sosial tertentu termaksud segala sesuatu diseperti interaksi tersebut. Interaksi tersebut berlangsung di dalam sistem internasional dimana negara merupakan aktor utama.

Kedua, hubungan internasional diartikan sebagai studi yang membahas tentang ilmu sosial yang objektif yang merupakan konteks dalam masyarakat internasional (Kennedy & Danreuther, 2007). Terakhir, hubungan internasional juga diartikan sebagai seluruh bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, baik itu disponsori oleh pemerintah atau tidak (Holsti, 1995).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi hubungan internasional adalah studi tentang ilmu sosial yang membahas mengenai interaksi antar aktor-aktor baik negara atau non-negara dalam bersikap dan menghadapi satu sama lain secara objektif.

1.7.1.2 Kebijakan Luar Negeri

Sebelum mendefinisikan ‘Kebijakan Luar Negeri’ lebih detail, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu kata ‘kebijakan’. Definisi kebijakan menurut Dictionary.com (2016) adalah suatu aksi pasti yang dipakai dan dilaksanakan oleh pemerintah berdasar kemanfaatannya.. Sementara definisi luar negeri adalah sesuatu yang memiliki hubungan dalam melakukan kontak terhadap negara lain (Dictionary.com, 2016).

Tidak hanya itu, terdapat pula definisi kebijakan luar negeri secara keseluruhan. Pertama, kebijakan luar negeri menurut Dictionary.com (2016) adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh negara dalam rangka menghadapi negara lainnya, dan didesain untuk mendapatkan kepentingan negara sendiri. Kedua, definisi kebijakan luar negeri menurut Marijke Breuning (2007) adalah totalitas kebijakan suatu negara terhadap dan untuk berinteraksi dengan lingkungan diluar batas

wilayah kedaulatannya. Terakhir, definisi kebijakan luar negeri menurut K.J Holsti (1995) adalah tindakan atau keputusan yang dirancang oleh pemerintah dalam menghadapi konteks dan situasi internasional yang bersifat konsisten dengan aturan dasar yang dimiliki negara, baik berupa diplomasi maupun militer.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi kebijakan luar negeri adalah tindakan atau keputusan pasti yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi negara lainnya, konteks dan situasi internasional, dimana keputusan yang dibuat telah dirancang berdasar kemanfaatannya dalam meraih kepentingan negara sendiri.

1.7.1.3 Dilema

Definisi Dilema menurut KBBI (2016) adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Sementara itu menurut Dictionary.com (2016), dilema adalah situasi yang terjadi ketika memerlukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang sama-sama tidak diinginkan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi dilema adalah situasi sulit yang terjadi ketika seseorang harus menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang ada, dan keseluruhannya sama-sama tidak menguntungkan.

1.7.1.4 Krisis

Definisi Krisis menurut Dictionary.com (2016) adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakstabilan atau bahaya, baik dalam sosial, ekonomi, politik, hubungan

internasional, yang berujung pada perubahan keputusan. Selain itu, Steven Fink (1986, pp. 21-25) memiliki definisinya akan krisis, yaitu:

An unstable time or state of affairs in which a decisive change is impending—either one with the distinct possibility of a highly desirable and extremely positive outcome, or one with the distinct possibility of a highly undesirable outcome. It is usually a 50-50 proposition, but you can improve the odds

Terakhir, definisi krisis juga dijelaskan oleh John Powel (2005, pp. 1-2) sebagai:

Kejadian yang tidak diharapkan, berdampak dramatis, kadang belum pernah terjadi sebelumnya yang mendorong organisasi kepada suatu kekacauan dan dapat menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya tindakan nyata. Krisis tidak memiliki batas dan dapat terjadi kapan saja, dimana saja terhadap setiap organisasi

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi dari krisis adalah suatu kondisi yang terjadi berupa ketidakstabilan baik dalam bentuk sosial, politik, ekonomi, maupun hubungan internasional. Kondisi tersebut bersifat tidak diharapkan, membawa perubahan yang besar bahkan lebih mengarah kepada kekacauan, dan berujung pada perubahan keputusan yang telah dipegang teguh oleh negara.

1.7.1.5 Identitas Peran

Sebelum mendefinisikan ‘Identitas Peran’ lebih detail, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu kata ‘identitas’. Definisi identitas menurut Marcia (1980, p. 109) adalah:

A self-structure - an internal, self-constructed, dynamic organization of drives, abilities, beliefs, and individual history. The better developed this structure is, the more aware individuals appear to be of their own uniqueness and similarity to others and of their own strengths and weaknesses in making their way in the world. The less developed this structure is, the more confused individuals seem about their own distinctiveness from others and the more they have to rely on external sources to evaluate themselves.

Sementara itu definisi dari ‘peran’ menurut Cambridge Dictionaries Online (2016) adalah posisi atau tujuan seseorang atau sesuatu yang dimiliki dalam situasi, organisasi, masyarakat, atau hubungan. Kemudian definisi ‘peran’ lainnya menurut Soekanto (1982, p. 239) adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi identitas peran adalah suatu struktur suatu individu yang memiliki konsep berupa posisi, sikap dan tujuan yang penting dalam menghadapi suatu organisasi, masyarakat maupun hubungan dengan individu-individu lainnya.

1.7.1.6 Identitas Kolektif

Sebelum mendefinisikan ‘Identitas Kolektif’ lebih detail, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu kata ‘identitas’. Definisi identitas menurut Marcia (1980, p. 109) adalah:

I would like to propose another way of construing identity: as a self-structure - an internal, self-constructed, dynamic organization of drives, abilities, beliefs, and individual history. The better developed this structure is, the more aware individuals appear to be of their own uniqueness and similarity to others and of their own strengths and weaknesses in making their way in the world. The less developed this structure is, the more

confused individuals seem about their own distinctiveness from others and the more they have to rely on external sources to evaluate themselves.

Kemudian definisi dari ‘kolektif’ menurut Cambridge Dictionaries Online (2016) adalah sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang, dimana biasanya dilakukan oleh seluruh anggota kelompok.

Terdapat pula definisi identitas kolektif secara khusus menurut Melucci (1995, p. 44) dimana identitas kolektif adalah “*Interactive and shared definition produced by several interacting individuals who are concerned with the orientation of their action as well as the field of opportunities and constraints in which their action takes place*”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi identitas kolektif adalah suatu struktur yang terbentuk karena terjadinya hubungan interaksi timbal-balik antar individu yang saling memperhatikan aspek berupa aksi, kesempatan dan hambatan. Individu-individu tersebut bersama-sama saling mewujudkan karena memiliki tujuan dalam aspek tertentu atau karena munculnya rasa solidaritas dari hasil interaksi tersebut.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hubungan internasional

1. Sebuah interaksi antar negara-negara yang berbeda baik disponsori oleh pemerintah negara itu sendiri ataupun tidak.

2. Sebuah konteks mengenai bagaimana dua negara atau lebih melakukan interaksi di luar batas wilayah kedaulatan negaranya.

1.7.2.2 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kebijakan luar negeri

1. Suatu rancangan aksi yang dibuat oleh suatu negara yang bersifat berada di luar batas wilayah kedaulatan negara itu sendiri.
2. Suatu rancangan aksi yang dirancang agar negara yang bersangkutan mendapatkan manfaat besar dengan melibatkan negara atau non negara lainnya.
3. Suatu perencanaan tindakan pemerintah suatu negara dalam menghadapi berbagai perubahan situasi internasional.
4. Suatu perencanaan tindakan pemerintah suatu negara dalam rangka melakukan kontak dengan pemerintah negara lainnya.
5. Suatu perencanaan aksi yang dibuat negara dengan tujuan mencapai kepentingan negara tersebut berupa melakukan interaksi dengan negara lain.

1.7.2.3 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dilema

1. Sebuah situasi dimana sebuah negara harus memilih antara beberapa pilihan yang sulit dalam melaksanakan suatu aksi.
2. Sebuah situasi ketika suatu negara masih banyak mempertimbangkan antara beberapa pilihan yang sama-sama tidak membawa manfaat kepada negara tersebut.

1.7.2.4 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan krisis

1. Suatu kondisi dimana negara mengalami ketidakstabilan karena terjadi suatu perubahan yang besar dan bahaya.
2. Sebuah kondisi suatu negara yang tidak diharapkan karena mengancam seluruh aspek negara tersebut (politik, ekonomi, sosial, hubungan internasional, dsb).
3. Suatu kondisi yang memicu kekacauan dalam negara tersebut dikarenakan negara belum pernah mengalami suatu perubahan sebelumnya.
4. Suatu kondisi ketidakstabilan suatu negara yang dapat berpengaruh maupun dipengaruhi oleh luar batas wilayah kedaulatannya.
5. Suatu kondisi perubahan besar suatu negara yang bisa berakhir kekacauan dan kehancuran negara, atau berakhir menjadi lebih baik dari sebelum perubahan tersebut terjadi.

1.7.2.5 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan identitas peran

1. Sebuah struktur dan konsep suatu negara yang berhubungan dengan kedudukan negara tersebut dalam hubungan internasional.
2. Sebuah struktur yang didapat suatu negara karena melakukan aksi dalam hubungan internasional secara berturut-turut.
3. Struktur yang diciptakan dengan tujuan mempromosikan suatu negara sebagai aktor yang penting dalam hubungan internasional.
4. Konsep struktur suatu negara yang berhubungan dengan melakukan aksi atas dasar kebijakan luar negeri yang sebelumnya terbentuk dari

faktor internal (lokasi, kapabilitas sumber daya negara, kebutuhan sosial-ekonomi, nilai nasional, ideologi, aturan tradisional, opini publik pribadi, kebutuhan politik) dan faktor eksternal (struktur sistem, nilai seluruh sistem, prinsip umum legal, komitmen perjanjian, pemahaman informal, opini dunia).

1.7.2.6 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan identitas kolektif

1. Sebuah konsep struktur yang membuat negara mengharuskan mengikuti segala aksi yang dilakukan secara berkelompok atas dasar solidaritas.
2. Sebuah struktur yang membuat negara berkomitmen melakukan aksi untuk melawan ancaman-ancaman yang muncul atas nama kelompok/organisasi.

1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian eksplanatif. Menurut Leedy dan Omrod (2005), penelitian eksplanatif menggunakan penjelasan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar “mengapa”, dengan tujuan ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah.

Penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan mengenai apa yang mendorong Finlandia tidak memainkan perannya sebagai *peacemaker* dalam konflik Rusia dan

Ukraina. Penelitian ini akan difokuskan pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Finlandia dalam menghadapi krisis Ukraina.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki jangkauan waktu pada awal Januari tahun 2014 hingga akhir Desember tahun 2014, ketika untuk pertamakalinya pemerintah Finlandia mengeluarkan kebijakan dalam menghadapi krisis Ukraina. Sementara jangkauan tempat yang digunakan adalah Finlandia.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*Library Research*) atau dokumentasi, di mana informasi yang didapat berdasarkan penelaahan literatur dan referensi dari berbagai data primer, seperti NATO, Pemerintah Finlandia dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, media massa, artikel, dokumen dan laporan, jurnal internasional, atau hasil catatan penting lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Definisi dari teknik analisis kualitatif adalah situasi aktivitas penelitian yang melibatkan pendekatan penafsiran dan naturalistik dalam meneliti material-material berupa catatan, sejarah, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo

yang kemudian akan menjadi jawaban dari studi kasus yang sedang diteliti. Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk dapat lebih memahami subjek maupun objek yang sedang diteliti. (Denzin & Lincoln, 2005, pp. 3-4). Teknik penelitian kualitatif berisi serangkaian upaya yang dilakukan dengan cara proses data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Moleong, 2007). Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian naturalistik, studi kasus atau fenomenologi, dikarenakan dasar dari data berlatar belakang fenomena natural yang diuraikan berupa kata-kata. Selain menggunakan studi literatur, observasi dan wawancara, penelitian ini juga dapat menggunakan pita rekaman, gambar, laporan berbentuk angka yang sudah diolah terlebih dahulu melalui proses penyuntingan, alih-bahasa, pengetikan dan pemaknaan data dengan tujuan data dapat digunakan lebih mudah untuk proses analisis (Miles & Huberman, 1992).

Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketika proses ini dilakukan secara bersamaan, interaktif, dan terus menerus sehingga tidak ditemukan data lebih lanjut yang memiliki hubungan dengan kasus yang hendak diteliti (1992).

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dan diinterpretasi dengan idiografi yaitu memaknai data secara khusus sehingga dapat membandingkan persamaan dan perbedaan pada fenomena tertentu, memahami sebab-akibat suatu

fenomena sehingga menghasilkan pola penjelasan tertentu yang bermakna (Miles & Huberman, 2009).

1. Reduksi data

Pada tahapan ini peneliti telah dibanjiri oleh data dan informasi terkait fenomena yang diteliti, oleh karena itu diperlukan proses pemilihan, penyederhanaan, merangkum, memilih hal yang pokok, dan membuang hal yang tidak perlu. Proses ini dilakukan terus menerus sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh peneliti, seperti pada kerangka konseptual, rumusan masalah dan tujuan permasalahan yang telah ditentukan peneliti.

Reduksi data dapat dilakukan dengan memberikan kode pembeda pada pola ataupun aspek tertentu, membuat kategorisasi menggunakan angka dan huruf dengan menggunakan catatan kecil ataupun komputerisasi, sehingga data yang penting tidak terbuang terbuang, dan data dapat lebih mudah ditemukan. Reduksi dilakukan agar data yang diolah telah terarah, mendukung proses pencarian data selanjutnya, untuk mendukung proses analisis permasalahan, serta membantu peneliti agar tetap berfokus pada makna dari fenomena yang sedang diteliti.

2. Penyajian data

Dalam tahapan ini, Miles dan Huberman membatasi penyajian data yang telah diolah agar dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan ataupun dapat menentukan tindakan selanjutnya. Penyajian dibuat dalam bentuk uraian singkat atau naratif, bagan, tabel, matrik, grafik, atau jaringan yang dirancang untuk menggabungkan informasi data yang telah direduksi, dalam suatu bentuk tersusun dan mudah dipahami, sehingga peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dapat

menentukan dan menarik kesimpulan yang benar, atau dapat menentukan langkah untuk terus melakukan analisis sebagaimana telah tersirat dari penyajian data.

Selain itu pula, data yang sudah dikumpulkan akan dianalisa lebih lanjut dengan bantuan konsep paradigma atau teori yang sudah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Penulis menggunakan teori Konstruktivis, dimana yang diutamakan dalam data tersebut adalah dapat dipercaya, dipastikan keberadaannya, dan mudah diserah terima kepada siapapun (Denzin & Lincoln, 2005, p. 24).

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi penelitian. Di awal penelitian peneliti cenderung memiliki kesimpulan awal, kesimpulan tersebut bersifat sementara dan terus berkembang seiring berjalannya penelitian. Bila suatu penelitian berhasil dengan tanda kesimpulan awal terus menerus didukung oleh data yang telah terkumpul dan telah disajikan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya dan valid, serta sah digunakan sebagai parameter terbaru sesuai dengan bidang kelimuan yang diteliti. Kesimpulan akhir diharapkan dapat menjawab rumusan masalah, ataupun sekadar menjadi temuan baru berupa deskripsi suatu fenomena dengan jelas.

1.7.7 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari peringkat analisis serta landasan teoritik, hipotesis dan metodologi penelitian yang terdiri operasionalisasi konsep, tipe dan jangkauan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Latar Belakang Konflik Rusia-Ukraina

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai berisikan latar belakang dari konflik antara Rusia dan Ukraina, yang juga menjadi awal dari latar belakang dan rumusan masalah.

BAB III Identitas Finlandia sebagai *Peacemaker*

Pada bab ini penulis akan memaparkan lebih lanjut mengenai identitas peran Finlandia sebagai *peacemaker*.

BAB IV Identitas Kolektif Antara Finlandia dengan Uni Eropa dan Pengaruhnya dalam Isu Krisis Ukraina

Pada bab ini berisikan pemaparan lebih lanjut mengenai identitas kolektif Finlandia sebagai negara anggota Uni Eropa yang bersikap kontra terhadap Rusia, dimana bertolak belakang dengan identitas perannya sebagai *peacemaker*.

BAB V Kesimpulan

Pada bab ini diharapkan dapat memberikan hasil dari analisis sebelumnya yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan juga membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya. Selain itu, dalam kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah Finlandia dalam mempertimbangkan lebih dalam mengenai faktor identitas yang mereka miliki sebelum menentukan kebijakan luar negeri.